

Sandiaga: Setelah Lebaran Ada Keputusan Cukup Berat

MALANG (IM) – Sandiaga Salahuddin Uno dalam beberapa hari ini terlihat kian mesra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini ditunjukkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu ketika kunjungan kerja di Kota Malang, Sabtu (15/4).

Menghadiri Malang Education Summit di Taman Krida Budaya, Kota Malang, Jawa Timur, Sandiaga menjadi pembicara dalam program Malang Cerdas yang diusung Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) dr. Gamal Albinsaid.

Sandiaga Uno mengaku sangat mendukung Malang Cerdas yang menurutnya menghadirkan energi untuk kebangkitan ekonomi pascapandemi.

Kolaborasi yang terjalin dengan kader muda PKS itu pun menandai beragam asumsi. Pasalnya, Sandiaga santer diusulkan akan melangkah bersama dengan PPP dalam Pemilu 2024.

Menjawab hal tersebut, Sandiaga Uno mengaku selalu mesra dengan PKS.

Menurutnya, hubungan baik yang terjalin sejak

lama harus terus dijaga, apalagi di bulan Ramadhan.

Selain itu, lanjutnya, Gamal merupakan mantan juru bicaranya ketika berkonstestasi dalam Pilpres 2019.

Oleh karena itu, dirinya mengaku sangat mendukung program Malang Cerdas yang diusung Gamal.

“Saya melihat beliau memanfaatkan generasi milenial dan generasi Z untuk mencapai Indonesia Emas. Malang Cerdas ini adalah bahan bakar untuk menuju Indonesia Emas,” kata Sandiaga menambahkan.

Terlepas dari isu yang berkembang, Sandiaga Uno mengaku tengah berkontemplasi untuk menentukan langkah politiknya ke depan.

Diyakininya, Ramadan 1444 Hijriah akan menjadi momen dirinya bertafakur untuk mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2024.

“Setelah Lebaran akan ada keputusan yang cukup berat, yang saya harus salat istikharah, wiridan dan bertafakur, karena tentunya langkah ke depan harus dipersiapkan. Pemilu tinggal 304 hari lagi, jadi mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan jalan,” jelasnya.

● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAHMAT GOBEL TINJAU GALERI UMKM BI

Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel (tengah) didampingi Kepala KPw Bank Indonesia Gorontalo Dian Nugraha (kanan) berbincang dengan pelaku usaha di galeri UMKM KPw BI Gorontalo di Kota Gorontalo, Gorontalo, Minggu (16/4). Galeri tersebut menampilkan 300 produk dari 100 pelaku usaha binaan Bank Indonesia yang terdiri dari tiga kategori yaitu fesyen, kerajinan tangan, dan olahan pangan.

Wow, Kantor Bupati Meranti Digadai Rp100 Miliar oleh Muhammad Adil

Muhammad Adil diduga gadaikan Kantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti, Riau, senilai Rp100 miliar ke Bank Riau Kepri pada 2022.

JAKARTA (IM) – Bupati nonaktif Kepulauan Meranti, Muhammad Adil diduga menggadaikan Kantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti, Riau, senilai Rp100 miliar ke Bank Riau Kepri pada 2022.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau gegabah menyimpulkan ada tidaknya tindak pidana dari langkah Adil itu.

“Kami tidak akan gegabah

untuk mengatakan ini salah atau tidak dulu,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Minggu (16/4).

Lembaga antirasuah itu masih mengkaji temuan tersebut. Pihak KPK akan menelisik lebih jauh mengenai skema kredit dari upaya gadai tersebut.

“Kami nanti akan menelisik lebih lanjut akan mengkaji, apakah mungkin sebuah kan-

tor yang merupakan aset dari negara itu dianggunkan kepada bank untuk sebuah kredit,” tutup Ghufron.

Sebelumnya, Muhammad Adil diduga menggadaikan Kantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti, Riau, senilai Rp100 miliar ke Bank Riau Kepri pada 2022. Uang tersebut diklaim digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Meranti.

Dari total Rp100 miliar, pihak bank baru mencairkan 59 persen atau sejumlah Rp59 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus menanggung semua utang itu dengan cicilan ke bank tiap bulan Rp3,4 miliar.

KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Meranti pada Kamis malam, 6 April 2023, malam. Para tersangka ialah Muhammad Adil, Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih, dan Pemeriksa Muda BPK perwakilan Riau M Fahmi Aressa.

Merka diduga terlibat dugaan suap penerimaan *fee* jasa umroh dan pengondisian pemeriksaan keuangan. Kasus ini masih didalami penyidik KPK.

Adil disangkakan melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Fahmi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dia juga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selanjutnya, Fitria disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Fahmi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemendagri Minta Masyarakat Tak Terkecoh Soal e-KTP Ganda

JAKARTA (IM) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terkecoh dengan adanya isu kartu tanda penduduk (KTP) ganda.

Sebelumnya beredar video yang menunjukkan foto wajah sama berada dalam tiga KTP atas nama Mada, Saidi dan Sukarno. Menurut Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, isu ini rutin selalu dimunculkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Awalnya muncul di tahun 2017 dan telah direspons oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta bahwa berita tersebut hoaks,” tandas Dirjen Teguh Setyabudi dalam keterangan resmi yang diterima wartawan pada Minggu (16/4).

Teguh menekankan, setiap satu penduduk Indonesia hanya mempunyai satu nomor induk kepemilikan (NIK), satu KTP, satu kartu keluarga (KK), dan satu alamat. Jika masyarakat menemukan temuan KTP ganda, Teguh mengimbau masyarakat menanyakan kebenarannya ke Dinas Dukcapil setempat.

“Jadi, masyarakat tolong jangan mudah terkecoh. Tanyakan ke Dinas Dukcapil terdekat,” ujarnya.

● han



FOTO: ANT

PENYALURAN BLT BURUH ROKOK

Buruh rokok menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat penyaluran di Kantor Pos, Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (15/4). Sebanyak 38.835 pekerja pabrik rokok di Jawa Tengah mendapat BLT provinsi masing-masing sebesar Rp300 ribu selama empat bulan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Dicekal terkait Kasus Rafael Alun

JAKARTA (IM) – Direktur Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro, bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan oleh Ditjen Imigrasi lantaran permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Wahono Saputro, Ditjen Imigrasi juga mencegah Istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, dua anak Rafael Angelina Embun Prasasya dan Christofer Dhyaksa, serta adik Rafael, Gangsar Sulaksono.

“Saat ini, semua nama tersebut dalam sistem daftar pencegahan berlaku 13 April 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh kepada wartawan, Jumat (14/4).

Diketahui, Rafael Alun merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menjadi tersangka KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi 90.000 dollar Amerika Serikat (AS).

Sedangkan Wahono Saputro Wahono ten-

gah masuk radar KPK karena istrinya memiliki saham di perusahaan properti istri eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Ia juga pernah diperiksa KPK lantaran nama istrinya tercatat sebagai pemilik saham di perusahaan properti seluas 6,5 hektar milik Ernie Meike di Minahasa Utara, Selasa Utara.

Istri Wahono disebut memiliki saham di perusahaan properti semhas 6,5 hektar milik istri Rafael Alun di Minahasa Utara.

Terlihat kasus Rafael Alun, KPK mendukung eks pejabat Ditjen Pajak itu menerima gratifikasi sebesar 90.000 dollar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana (AME).

Ketua KPK Firlu Bahuri menyebut, dugaan gratifikasi diterima dalam kapasitas Rafael sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada DJP, Kementerian Keuangan. Dalam posisi itu, Rafael berwenang meneliti dan memeriksa temuan perpajakan wajib pajak yang diduga melenceng dari ketentuan.

Selain itu, Dengan posisi tersebut, Rafael diduga aktif merekomendasikan para wajib pajak menggunakan perusahaan konsultan pajak miliknya, PT AME. ● mei

Kepala BNN Kota Tasikmalaya Disebut Korupsi Jika Terima THR dari Perusahaan Bus Budiman

JAKARTA (IM) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim bisa dikategorikan korupsi bila terima Tunjangan Hari Raya (THR) berupa uang dari perusahaan otobus (PO) Budiman.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufro, menanggapi adanya surat permintaan THR dari BNN Kota Tasikmalaya ke perusahaan bus tersebut.

“Iya masuk, (jika) minta (uang), gratifikasi itu,” kata Ghufron saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/4).

Kendati demikian, Ghufron menilai, persoalan permintaan THR ke perusahaan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh BNN. Namun, Komisioner KPK ini menegaskan penyelenggara negara tidak boleh menerima ataupun meminta uang kepada pihak manapun.

“Iu kan sudah ditindaklanjuti, itu masih baru surat (permintaan THR) kan belum anu (diterima uangnya),” kata Ghufron.

Sementara itu, BNN Provinsi (BNNP) Jawa Barat telah membebastugaskan sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BNN Kota Tasikmalaya yang terlibat permintaan THR ke PO Budiman.

Kepala BNNP Jawa Barat Brigjen Pol M Arief Ramdhani tidak mengungkapkan nama dan jumlah PNS yang dibebastugaskan. Namun, diketahui Kepala BNN Tasikmalaya secara sadar menandatangani surat tersebut.

“Menindaklanjuti hal tersebut, untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sejak yang bersangkutan diperiksa,” ucap Arief Ramdhani dalam keterangannya, Jumat (14/4).

Menurut Arief Ramdhani, saat ini rangkaian proses pemeriksaan masih dilakukan oleh penyidik BNNP Jawa Barat, maupun tim Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN. Arief mengatakan, BNN Provinsi Jawa Barat tidak akan segan menindak personel

yang melanggar aturan.

Sebelumnya diberitakan, BNN Tasikmalaya mengirim surat permintaan THR ke perusahaan bus, PO Budiman. Surat itu berkop BNN Kota Tasikmalaya dan ditandatangani Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim.

Humas PO Budiman Tasikmalaya Lujen mengatakan, sudah mengetahui adanya surat itu, tapi belum sempat menerima secara langsung.

Sementara, Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim, membenarkan terkait surat itu. Iwan pun mengakui perbuatannya salah dan telah mencabut surat tersebut.

“Itu mungkin suatu kesalahan dari kami. Saya pimpinannya, hal itu tidak boleh terjadi. Saya berpikir sebenarnya hanya untuk anggota saja, tapi surat itu sudah dicabut,” katanya.

Sekelompok masyarakat kemudian mengirimkan setandan pisang dan uang mainan ke kantor BNN Tasikmalaya sebagai bentuk sindiran. ● han

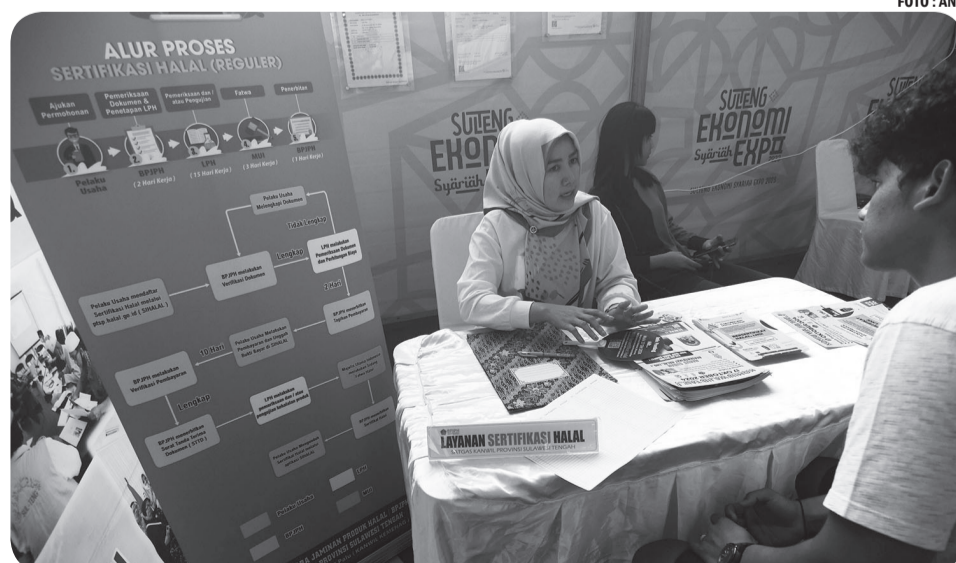


FOTO: ANT

LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memaparkan tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (15/4). Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal atas produknya sebagai wujud perlindungan bagi konsumen dan Indonesia menargetkan menjadi produsen makanan dan minuman halal nomor satu dunia dengan target 10 juta produk bersertifikat halal di tahun 2024.

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. MULTI MITRA NUSANTARA INTERNASIONAL (PT. MULTIMITRA NUSANTARA INTERNASIONAL), berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), tanggal 07 April 2023, nomor 2, dibuat oleh BAGUS NUGRAHA KUSUMA WARDHANA, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 152 (3) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, Para Pemegang Saham Perseroan telah memutuskan untuk menerima laporan pertanggungjawaban dan menyetujui hasil akhir laporan kerja likuidator Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada likuidator Perseroan.

Selubungan dengan telah diterimanya laporan pertanggungjawaban likuidator, maka proses likuidasi Perseroan telah selesai dan status Badan Hukum Perseroan telah berakhir tertanggal sejak tanggal Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham yaitu pada tanggal 07 April 2023.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar diketahui dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

Jakarta, 17 April 2023
Tim Likuidator